

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keprihatinan akan terjadinya permasalahan penduduk ini yang secara perlahan memunculkan suatu konsep yang membahas akan rencana pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan tentang kependudukan. Dengan adanya permasalahan kependudukan yang terjadi hampir diseluruh negara, maka dengan melalui sebuah konferensi Internasional yang dilakukan di Cairo pada tahun 1994 yang membahas tentang pembangunan dan kependudukan atau ICPD sebanyak 120 negara berjanji untuk menyediakan sebuah pelayanan Kesehatan reproduksi untuk semua warga negaranya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Pada bulan September tahun 2000, sebuah Langkah besar yang dilakukan sebelumnya yang kemudian, dilanjutkan dengan Millenium Development Summit (MDS) yang dilakukan di New York. Pada pertemuan inilah terdapat kesepakatan besar yang dikenal dengan kespakatan MDGs atau Millenium Development Goals, yang memiliki lima komitmen, yaitu:

1. Penghapusan akan Kemiskinan & Kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar yang sifatnya universal
3. Promosi akan kesehatan gender serta melakukan pemberdayaan perempuan.
4. Menjamin kelestarian akanlingkungan hidup, dan
5. Pengembangan kemitraan global yang ditujukan untuk pembangunan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan pulau yang berbentuk Negara kesatuan. Menurut Badan Pusat Statistic, Indonesia mempunyai 16.056 pulau pada tahun 2017 . Negara Indonesia termasuk dalam kategori golongan negara berkembang,

yang memiliki salah satu permasalahan yang digeluti, yaitu permasalahan mengenai pertumbuhan penduduk sehingga menimbulkan kepadatan kependudukan.

Melihat peningkatan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, menempatkan Indonesia berada di posisi ke-empat terpadat didunia. Hasil Sensus Penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270,200.000 jiwa, hal ini menandakan bahwa terdapat kenaikan sebesar 32,560.000 jiwa apabila melihat hasil sensus yang dilakukan tahun 2010.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia seperti dengan Negara - negara berkembang lainnya yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.. Pada tahun 1961 hingga 1971, dalam kurun waktu 10 tahun ini, pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia adalah sebesar 2,10%, namun pada satu dekade berikutnya yaitu pada tahun 1971-1980 meningkat menjadi 2,32%. Kemudian pada tahun 1980 hingga tahun 1990 mengalami penurunan menjadi 1,98% dan pada tahun 1990 hingga 2000 menurun kembali 1,45%. Namun 10 tahun awal ditahun millennium yaitu tahun 2000 hingga 2010 mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,49%. (BPS, 1974;2000;2010).

Tabel 1.1
Peringkat Negara Dengan Penduduk Terbanyak Didunia Tahun 2018

Peringkat	Negara	Jumlah Penduduk
1.	Cina	1,427,647,786
2.	India	1,352,642, 280
3.	Amerika Serikat	327,096.265
4.	Indonesia	267.663.435
5.	Pakistan	212,228,286

Sumber: World Populations, 2019 (Diolah)

Melihat tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun yang terus meningkat, membuat pemerintah Indonesia tidak dapat meratakan kesejahteraan rakyat. Maka dengan ini ditakutkan dapat menimbulkan berbagai masalah lain seperti permasalahan ekonomi yaitu tingginya pengangguran, dan kemiskinan, kemudian permasalahan Pendidikan, kemudian rendahnya kualitas Kesehatan, lingkungan kumuh, kekurangan pangan dan tingginya angka kriminalitas. Melihat masalah yang timbul akibat dari pertumbuhan penduduk ini, oleh karena itu pemerintah perlu menangani laju pertumbuhan penduduk dengan mencetuskan kebijakan untuk melakukan Program Keluarga Berencana (KB).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang besar yang terletak ditengah Pulau Jawa, yang menaungi 35 kota dan kabupaten. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Jawa Tengah sebesar 34.718.204 dan pada tahun 2020 sebesar 36 516 035. Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 10 tahun di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan stabil berada di angka 0,71%. Melihat pertumbuhan penduduk yang masih meningkat, maka dengan ini pelaksanaan program KB di Jawa Tengah masih terus diupayakan agar terus memenuhi target.

Tabel 1.2
Jumlah PUS & Peserta KB di Jawa Tengah
Tahun 2015 s.d 2018

	2015	2016	2017	2018
Jumlah PUS	6.736.249	6.727.894	6.727.894	6.527.869
Jumlah Peserta KB	5.270.734	5.679.960	5.679.960	4.810.077

Sumber BPS Provinsi Jawa Tengah 2018

Berdasarkan tabel diatas, total keseluruhan Pasangan Usia Subur (PUS) di Jateng mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 yang berjumlah 6.736.249 menjadi 6.727.894 orang ditahun 2016 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018. Namun

melihat jumlah peserta KB di Jawa Tengah tidak sebanyak dengan jumlah Pasangan Usia Subur. Jumlah Peserta KB yang turun drastis pada tahun 2018 sebesar 4.810.077 yang tahun sebelumnya berjumlah 5.679.960 orang. Hal ini menunjukkan bahwa program KB di Provinsi Jateng belum terlaksana secara optimal.

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi nomor 3 yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data BPS pada tahun 2018, Laju Pertumbuhan di Kota Semarang yaotu sebesar 1,65%. Jumlah Penduduk Usia Produktif di Kota Semarang mencapai 74% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di kota Semarang yaitu sebesar 1.668.578 Jiwa yang tersebar di 16 wilayah kecamatan. Dari jumlah keseluruhan penduduk di kota Semarang. (Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 2018).

Table 1.3
Jumlah Peserta Aktif KB & Pasangan Usia Subur
di Kota Semarang tahun 2017 s.d 2019

	2017	2018	2019
PUS	261.873	262.729	25.794
KB AKTIF	401.981	205.201	455.896

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2018

Melihat data diatas jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Semarang mengalami peningkatan Sebesar yang pada tahun 2017 sebanyak 261.873 menjadi 262.729 pada Tahun 2018, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2019, sehingga total PUS di tahun 2019 sebesar 25.794 orang. Namun melihat Jumlah Peserta KB di Kota Semarang pada tahun 2017 melebihi dari Jumlah PUS di Kota Semarang yaitu sebesar 401.981 Jiwa. Namun mengalami penurunan drastis sebesar 196.780 jiwa pada tahun 2018 yang menjadi 205.201. Pada Tahun 2018 ini peserta aktif KB lebih sedikit dibandingkan dengan Jumlah

PUS di Tahun itu. Namun pada Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sehingga pada tahun 2019 peserta KB aktif di Kota Semarang menjadi 455.896 Jiwa.

Table 1.4
Peserta KB Aktif Kecamatan Gajah Mungkur
Tahun 2017 s.d 2020

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	881	996	960	1040
Perempuan	5.396	5113	5300	5161
Jumlah	6.096	6129	6260	6201

Sumber : Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Semarang (diolah)

Kecamatan Gajahmungkur merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kota Semarang, yang jumlah peserta aktif KB meningkat setiap tahunnya, namun melihat data diatas peserta aktif KB lebih didominasi oleh perempuan, karena jumlah pengguna KB Pria tidak ada setengah dari jumlah keseluruhan pengguna KB wanita. Hal ini lah yang menjadi permasalahan, pengguna KB lebih didominasi oleh wanita.

Table 1.5
Peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi
Di Kelurahan Petompon
Tahun 2017 s.d. 2020

Tahun	Metode Kotrasepsi/ Akseptor KB							
	Suntik	Pil	Mop	Mow	IMP	IUD	Kondom	Jumlah
2017	254	63	1	69	22	90	91	590
2018	258	45	1	67	32	86	154	643
2019	231	47	0	70	21	86	146	601
2020	185	43	1	82	27	97	154	589

Sumber :Data Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kec.GajahMungkur

Keterangan ;

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

IMP : Implant

IUD : Intrauterine Device (alat kontrasepsi dalam rahim)

Kelurahan Petompon merupakan salah satu kelurahan yang berada dibawah naungan kecamatan Gajahmungkur yang peserta KB Pria hanya sedikit. Melihat data yang telah dipaparkan , bahwa pengguna aktif akseptor KB di dominasi oleh perempuan sedangkan partisipasi pria dalam penggunaan akseptor KB di kelurahan Petompon masih dikatakan rendah. Pada data terakhir pada tahun 2020 jumlah peserta Pria hanya 155 orang, yang terbagi 154 orang pengguna kondom dan 1 orang melakukan MOP. Hal itu masih sangat jauh dengan total perempuan yang aktif dalam program KB di kelurahan Petompon yang berjumlah 434 Orang.

Program Keluarga Berencana (KB) harus bisa diimplementasikan secara baik, karena hal ini telah diatur dalam UU No.52 Tahun 2009 pasal 23:1 yang membahas tentang Perkembangan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga yang berbunyi

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses serta kualitas informasi, pendidikan konseling dan pelayanan kontrasepsi”

Program Keluarga Berencana yang dibuat pemerintah ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Program Keluarga Berencana ini mengatur batas minimal usia perkawinan, mengatur jarak kehamilan pertama dengan kehamilan selanjutnya serta mengatur jumlah anak ideal dalam satu keluarga. Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh penduduk untuk ikut serta dalam partisipasi menjalankan program ini, yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa pentingnya program ini.

Tingkat partisipasi pria yang masih tergolong rendah dalam penggunaan alat kontrasepsi ini menimbulkan ketimpangan gender dalam pelaksanaan program KB. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama antara banyak pihak termasuk pihak istri untuk dapat mendorong suami agar mau terlibat dalam pelaksanaan program KB ini. Selain itu masih adanya mitos yang berkembang di masyarakat bahwa keterlibatan pria dalam pelaksanaan KB akan mempengaruhi tingkat seksual. Pelaksanaan program KB-Pria ini, diharapkan mampu dilaksanakan baik dari perempuan / istri maupun pria / suami, ini sesuai dengan isi dari UU No.52 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat (1) :

“baik istri beserta suami memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama dalam melaksanakan program Keluarga Berencana.”

Karena selama pelaksanaan program ini, cenderung perempuan yang di khususkan untuk melaksanakan program ini, sedangkan program ini juga ditujukan untuk pihak pria, namun dalam pelaksanaannya masih sangat terlihat jumlahnya yang mengalami ketimpangan. Hal ini menjadikan gambaran bahwa perlunya perhatian Pemerintah terhadap pelaksanaan program KB ini agar keterlibatan pria dalam implementasi program ini lebih meningkat

Pemerintah Kota Semarang juga melakukan upaya dalam peningkatan kepesertaan KB dengan mengeluarkan regulasi Peraturan Walikota Semarang No 13 Tahun 2020 mengenai Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang Bersama dengan Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana yang kemudian juga dibantu oleh coordinator lapangan KB serta kader KB yang berada di kelurahan yang tercakup dalam Kota Semarang. Pada Peraturan Walikota Kota Semarang No 13 Tahun 2020 ini mengenai urusan Keluarga Berencana dilaksanakan dengan delapan strategi yaitu : (1) Pembinaan dan Peningkatan kemandirian Keluarga Berencana, 2) Promosi dan Penggerakan Masyarakat, 3) Penguatan Sumber daya penyelenggara program KB, Sosialisasi dan Penyuluhan program, program Penundaan Perkawinan (PUP), 4) Mempertahankan kesertaan KB dan peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka Panjang, 5) Meningkatkan program pemberdayaan wanita , 6) mendorong pembentukan pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja, 7) Menekan angka dropout, 8) meningkatkan pelayanan KB, KIE, serta meningkatkan kemampuan pelayanan.

Pada Penelitian ini, Peneliti ingin mengamati tentang implementasi program KB yang melalui Proses serta rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Semarang beserta Petugas Penyuluhan Lapangan dalam memberikan informasi mengenai kb pria dan mengenalkan alat dan metode Kontrasepsi s kepada warga kelurahan petompon khususnya para pasangan usia subur sesuai dengan program pemerintah kota semarang yaitu meningkatkan KIE KB dan sosialisasi Penyuluhan Program

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan program KB dengan judul : Implementasi Program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Topik yang dipilih ini berdasarkan

pada data mengenai pengguna alat kontrasepsi yang didominasi oleh perempuan. Disamping alasan tersebut, peneliti mempertimbangkan bahwa dalam penelitian ini, masih dibawah cakupan kajian dalam Administrasi Publik.

1.2.Rumusan Masalah

Program Keluarga Berencana adalah sebuah program yang disusun oleh pemerintah yang bertujuan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat. Program KB ini mengatur jarak kehamilan, jumlah anak yang ideal, batas usia perkawinan serta penundaan kehamilan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Berbagai macam metode kontrasepsi yang dapat dilakukan baik untuk Pria ataupun Wanita untuk menunda kehamilan. Dalam implementasi Program KB ini diharapkan dilakukan oleh kedua pihak, namun kenyataannya program KB ini lebih didominasi oleh pihak wanita.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, oleh ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program KB Pria di Kelurahan Petompon?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam Implementasi Program KB Pria di Kelurahan Petompon?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi program KB Pria di Kelurahan Petompon Kota Semarang
2. Menganalisis factor penghambat serta pendorong dalam implementasi Program KB Pria di Kelurahan Petompon Kota Semarang.

1.4.Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Pada penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Program KB Pria.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi tentang Implementasi Program KB Pria di Kelurahan Petompon.

c. Manfaat Sosial

Pada penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu pemerintah, mengenai informasi faktor yang menjadi penghambat serta pendorong dalam implementasi program tersebut.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada Bagian Kerangka Teoritis ini menjelaskan tentang teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu, Konsep Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Berencana

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Pada pemaparan penelitian yang dilakukan terdahulu ini menjadi salah satu bentuk acuan yang dilakukan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menambah serta memperbanyak yang mampu digunakan dalam pengkajian penelitian yang dilakukan ini. Melihat penelitian terdahulu, tidak ditemukan judul penelitian lain yang sama dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis. Berikut penelitian terdahulu, dengan berupa jurnal yang terkait dengan penelitian ini ;

Tabel 1.6
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aryan Prasetyawan, Zainal Hidayat, Nina Widowati. 2013	Tujuan penelitian ini adalah <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan mengenai implementasi program KB di Wilayah Spondol Kulon - Mengetahui faktor pendorong serta penghambat dalam implementasi Program KB Pria MOP di Spondol Kulon. 	Hasil dari penelitian ini adalah masih rendahnya respon masyarakat terhadap program KB Pria, karena masih banyak yang tidak paham dan mengetahui tentang KB Pria, masih berkembangnya stigma negative terhadap KB Pria di masyarakat sehingga menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan program KB Pria. Ketidaktahuan masyarakat mengenai KB Pria dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas konseling terhadap KB Pria.
2.	Wawan Patriansyah. 2016	Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan mengenai implementasi kebijakan dalam peningkatan KB Pria dalam Program KB di 	Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan KB di Kab. Tapanuli berjalan cukup baik karena adanya peningkatan kesetaraan KB Pria sebagai bentuk terwujudnya kesetaraan

		<p>Kecamatan Batang Toru, Taonanuli Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program KB 	<p>dan keadilan gender terhadap program KB, masih rendahnya Sumber Daya Manusia anggota PLKB, sehingga terdapat program-program yang tidak maksimal serta belum terbentuknya struktur organisasi di kecamatan.</p>
3.	Muhammad Rizal. 2016	<p>Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan mengenai implementasi kebijakan peningkatan KB Pria dalam Program KB di Kecamatan Kampar Kiri Hilir - serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program KB 	<p>Hasil dari penelitian ini adalah masih kurang optimalnya implementasi Kebijakan Program KB di kecamatan Kampar Kiri Hilir. Karena penyuluhan yang dilakukan oleh PLKB tentang KB Pria masih belum dilakukan karena masih rendahnya pendidikan, serta belum terbentuknya struktur organisasi di Kecamatan tentang pelaksanaan KB.</p>
4.	Yani. 2017	<p>Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui mengenai implementasi kebijakan dalam peningkatan kesertaan KB pria di Kecamatan 	<p>Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah mengenai Implementasi kebijakan peningkatan kesertaan KB pria perlu mendapat perhatian, terutama KIE (Komunikasi Informasi</p>

		<p>Belawa Kabupaten Wajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pria dalam ber KB? 	<p>Edukasi) dalam hal penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang vasktomi dan kontrasepsi pria, Masih rendahnya kualitas sumber daya Petugas KB yang mempengaruhi kemampuan dan keterampilan petugas KB dalam memasarkan alat kontrasepsi bagi pria.</p>
5.	Natsir, Muhammad. 2021	<p>Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan serta menganalisis mengenai faktor apa yang menyebabkan program keluarga berencana (KB) pria pada Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang belum berjalan dengan harapan.</p>	<p>Hasil Penelitian ini adalah bahwa terdapat factor yang mempengaruhi yaitu pada factor komunikasi, struktur birokrasi disposisi dan sumberdaya yang belum berjalan dengan baik. Factor komunikasi yang masih kurang baik. Hal ini terlihat dari adanya transmisi yang tidak lancar, kemudian kejelasan informasi yang diterima dan konsistensi program KB pria. Sumberdaya para pelaksana yang belum memadai, hal ini dapat</p>

			dilihat dari masih sedikitnya staff dalam pelaksanaan program KB pria ini. Kemudian disposisi atau sikap implementor yang belum dapat mendukung akan program ini terlihat dari rendahnya motivasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pria dalam pelaksanaan program KB pria. Tidak diterapkannya standar prosedur penyaluran alat kontrasepsi ini sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang ada
6.	Andriari, Muthia dan Janianton. 2019	Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu Mengetahui bagaimana pengarusutaman gender dalam implementasi program KB di Kota Yogyakarta	Hasil Penelitian ini adalah terdapat sejumlah aspek pengarusutamaan gender yang sudah diakomodasi dan yang belum maksimal dilakukan

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas mengenai implementasi KB Pria baik metode MOP dan Metode Kondom, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi di wilayah kelurahan Petompon yang dimana wilayah ini belum dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Pada Pria .

1.5.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah ilmu kajian yang digunakan sebagai alat dalam penyelenggaraan Negara yang digunakan dalam pencapaian tujuan Negara yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam Administrasi Publik dibagi menjadi 2 tujuan yaitu memberikan pelayanan (Manajemen Publik) dan adanya Program-Program (Kebijakan Publik) yang dapat memberikan manfaat untuk publik.

Administrasi Publik menurut Menurut Henry (Paslong, 2007:8) ialah bentuk kombinasi yang dapat dikatakan kompleks mengenai teori serta praktik, yang mempunyai tujuan yakni mempromosikan sebuah pemahaman terhadap pemerintah mengenai hubungan dengan masyarakat, serta mendorong terhadap kebijakan publik mampu lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis (dalam Trinatis,2019) menjelaskan bahwa administrasi publik terdiri atas implementasi kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh badan atau lembaga politik.

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi menurut para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Administrasi Publik yaitu sebuah kombinasi mengenai pemahaman suatu teori dan praktik yang berupa ilmu hukum social dan politik serta manajemen dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai metode-metode prinsip dasar, atau cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (Kuhn, 1970). Dalam setiap disiplin ilmu pasti akan mengalami sebuah krisis atau anomalies sehingga orang mulai memikirkan pandangan baru yang lebih relevan atau akan muncul sebuah paradigma baru.

Menurut Robert T. Golembiewski (dalam Yeremias T. Keban 2008) dijelaskan bahwa standar disiplin suatu ilmu mencakup dua hal yaitu *focus* dan *locus*. Fokus berisikan tentang metode dasar yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan lokus melingkupi lokasi dimana metode dasar untuk menyelesaikan masalah diimplementasikan. Berdasarkan disiplin yang sudah dijelaskan, maka muncul lima paradigma yang menjadi dasar dalam ilmu administrasi publik.

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926) oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Paradigma ini berisikan pemisahan antara politik dan administrasi. Pusat perhatian politik harus berada pada kebijakan atau kemauan rakyat, sedangkan administrasi berfokus pada pengimplementasian kebijakan.
2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937) oleh Willoughby Gullick dan Urwick. Paradigma ini berisikan prinsip administrasi publik yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen. Prinsip tersebut kemudian dikonsepsikan dalam bentuk POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*)
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Administrasi publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang bukan *value free* tetapi justru dipengaruhi oleh nilai-nilai lainnya. Pada paradigma ini ilmu politik memiliki andil yang sangat besar terhadap administrasi publik, sehingga

muncul anggapan bila administrasi publik sebagai ilmu politik dengan lokusnya adalah birokrasi pemerintah dan fokusnya masih belum jelas karena banyak prinsip administrasi publik yang mempunyai banyak kelemahan.

4. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970). Prinsip-prinsip dalam ilmu administrasi publik mulai dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perkembangan dari paradigma ini berada pada orientasi ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan bertitik tumpu pada kebijakan publik. Pada paradigma ini semua fokus dikembangkan di segala sektor bisnis maupun administrasi publik sehingga membuat lokus menjadi tidak jelas.
5. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang sudah jelas, dimana fokus paradigma ini adalah kebijakan publik, teori organisasi, dan teori manajemen, sedangkan lokusnya adalah permasalahan dan kepentingan publik.

6. Paradigma *Governance*

Konsep *governance* menurut Stoker (1998) (dalam Teguh Kurniawan, 2007) merujuk kepada kaburnya batas antara sektor publik dan sektor privat akibat dari pada pengembangan gaya memerintah yang baru. *Governance* menjadi sebuah paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan. Sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan tiga pilar yang ada didalam paradigma *Governance*. Setelah terjadi pergeseran paradigma yang ditandai dengan adanya kolaborasi kesetaraan dan keseimbangan antara

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*) maka dikembangkan paradigma baru dari administrasi publik yang disebut sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*).

Didalam paradigma *good governance* terdapat negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*) yang memiliki hubungan sinergis dan konstruktif dengan menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Adapun peran dari masing-masing aktor dalam *governance* adalah negara (pemerintah) memiliki peran untuk menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif; sektor privat atau swasta mempunyai fungsi untuk membuat lapangan pekerjaan dan pendapatan; dan masyarakat mempunyai peran sebagai fasilitator interaksi secara sosial dan politik yang mendukung pergerakan individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial.

Penelitian ini menggunakan paradigma Administrasi Publik keenam yaitu Paradigma *Governance*.

1.5.4. Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy secara umum digunakan untuk memperlihatkan perilaku atau tindakan seorang aktor kepentingan seperti pejabat atau lembaga tertentu yang bertujuan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kebijakan Publik juga dapat dikatakan sebagai serangkaian program, sikap, keputusan atau sebuah aksi yang dilakukan oleh pemerintah atau actor kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Suatu kebijakan dapat mencakup harapan-harapan yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pada saat ini yang terjadi kebijakan secara umum selalu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah atau kerab dikaitkan dengan sebuah tindakan politik. Hal ini didukung dengan adanya suatu konsep kebijakan dari Carl Frederich (Abdal, 2015) yaitu :

“... a proposed course of action of a person, group, or government whitin a given environment providing abstract and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in effort to reach a goal or realize an objective or a purpose”

(... rangkaian tindakan yang diajukann seseorang, pemerintah taupun kelompok dalam lingkungan tertentu dengan menunjukan suatu gambaran peluang serta usulan kebijakan dalam mencapai tujuan.)

Kebijakan Publik dibuat berdasarkan atas peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan mampu mengatasi atau mengurangi masalah yang terjadi akibat peningkatan kebutuhan tersebut. Berikut pengertian Kebijakan Publik menurut para ahli :

- a. Menurut Easton (Taufiqurohman 2014:03) kebijakan public dapat dikatakan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat
- b. Dye (Agustino,2016:15) kebijakan publik adalah What do, why they do it and what difference it make. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public adalah apa yang atau dikerjakan oleh pemerintah dan kerjaan tersebut menghasilkan sesuatu.
- c. Anderson (Agustino,2016:15) mendefinisikan kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan serta dilakukan oleh sekelompok actor yang memiliki hubungan dengan permasalahan tersebut.

Melihat kebijakan publik yang memiliki sifat memaksa secara sah untuk dilakukan. Untuk membuat suatu Kebijakan Publik, perlu melewati beberapa proses atau tahapan.

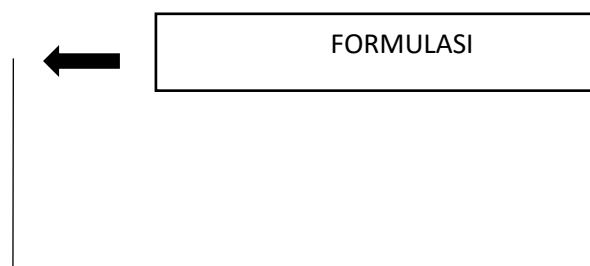
Menurut Thomas R. Dye²⁴ (dalam Ariani,2018), model kebijakan publik dikembangkan melalui beberapa tahapan yaitu:

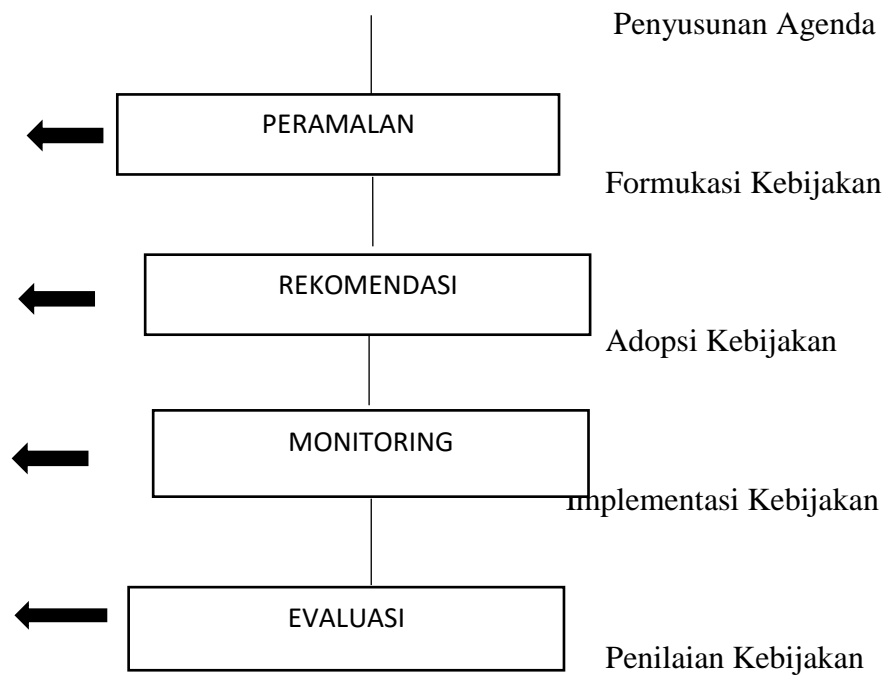
- a. Identifikasi Permasalahan
- b. Pengaturan Agenda
- c. Perumusan Kebijakan
- d. Pengesahan Kebijakan
- e. Pelaksanaan kebijakan

Sedangkan menurut Willian N. Dunn 1999:24 (dalam Ariani,2018) tahapan dalam Kebijakan Publik adalah

- a. Perumusan / Formulasi Kebijakan
- b. Pendugaan (Peramalan) / Forecasting
- c. Pertimbangan (Rekomendasi)
- d. Pemantauan / Monitoring
- e. Evaluasi Kebijakan

Gambar 1.1
Tahapan Kebijakan Publik





Sumber : Ariani,2018 (diolah)

Melihat dari tahapan yang dijelaskan oleh para ahli, dalam tahapan kebijakan publik tahapan paling berpengaruh adalah pada tahapan implementasi, karena dirasa apakah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut membawa pengaruh baik atau dapat dikatakan mampu dalam menyelesaikan masalah di masyarakat

1.5.5. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan yang telah ditetapkan dan diambil sebagai implementasi merupakan jalan alternative sebagai suatu penyelesaian masalah harus dilaksanakan atau diimplementasikan nyata ke lingkungan. Maka dengan itu proses atau tahapan merealisasikan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi kebijakan adalah proses atau tahapan terpenting dalam suatu kebijakan publik, karena pada tahapan ini dapat diketahui bagaimana kebijakan ini membawa pengaruh baik dalam mengatasi masalah yang timbul dimasyarakat. Untuk dapat memahami implementasi berjalan dengan efektif tidak hanya memfokuskan pada sikap lembaga setra lembaga administrasi yang memiliki bertanggung jawab mengenai

program atau kebijakan serta pelaksanaan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, tetapi perlu dilakukan pengawasan mengenai kekuatan ekonomi, politik dan social yang dapat mempengaruhi perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut.

Beberapa penjelasan serta definisi implementasi kebijakan public menurut beberapa ahli yaitu definisi menurut Maxmanian dan Sabatier (Agustino, 2006:139) yaitu pelaksanaan keputusan dasar, yang berbentuk peraturan atau undang-undang maupun perintah serta keputusan lembaga eksekutif atau lembaga peradilan

Menurut Jenkins (dalam Arina,2018) implementasi yaitu studi mengena bagaimana perubahan terjadi, Bagaimana suatu perubahan bias terjadi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Ariani,2018), Implementasi Kebijakan Publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat dan kelompok pemerintah atau swasta yang terarah untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan.

Dalam pendapat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya kemungkinan implementasi yang efektif dapat bergantung pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan,kemudian terdapat faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau tidaknya tujuan program akan mengalami perbedaan dengan antara kebijakan satu dengan lainnya.

Dari beberapa pengertian implementasi yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya oleh badan lembaga yang sah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan ini tahapan implementasi sangat berpengaruh terhadap proses suatu kebijakan karena pada tahap ini seluruh prosedur kebijakan dapat dipengaruhi keberhasilan ataupun tidaknya dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

1.5.6. Model – Model Implementasi Kebijakan

Seiring perkembangan Zaman Teori Implementasi public juga mengalami perkembangan seiring dengan hasil riset. Pada tahun 1970 para ilmuwan berusaha mengembangkan tentang studi implementasi untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu kebijakan. Pada saat itu studi implementasi menggunakan model *Bottom-up* dan *Top-down*.

1) Pendekatan *Top-Down*

Pada model pendekatan *top down* ini merupakan sebuah pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat/masyarakat. Pada model ini partisipasi menjadi bentuk mobilisasi dalam melaksanakan kebijakan.

2) Pendekatan *Bottom-Up*

Sedangkan padamodel *Bottom-Up* ini memiliki arti kebijakan dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh rakyat/masyarakat. Dalam model ini kedua pihak ini terdapat interaksi pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Model Implementasi Kebijakan Publik banyak dikemukakan oleh beberapa Ahli, salah satunya adalah model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Agustino, 2016:156) yaitu ‘Direct and Indirect Impact Implementation.’ Model ini terdapat empat faktor yang memepengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan yakni:

a. Sumber Daya

Faktor Sumber Daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan karena pada pelaksanaan kebijakan diperlukan kejelasan dan konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. apabila anggota yang melakukan kebijakan tersebut kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kurangnya sumber daya yang lainnya sehingga dapat memengaruhi keefektifan pekerjaannya maka dapat memengaruhi keefektifan implementasi kebijakan tersebut

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk kegiatan untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi pemikiran serta perasaan manusia. Komunikasi merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan karena menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Suatu implementasi kebijakan yang efektifitas apabila para implementator mengetahui mengenai apa yang harus mereka kerjakan. Untuk mengetahui hal itupun perlu adanya komunikasi yang baik dengan keseluruhan pihak serta melakukan dengan prosedur yang telah di tetapkan.

c. Sikap / Disposisi

Faktor Sikap atau disposisi ini diartikan sebagai sikap dari para implementator dalam melakukan kebijakan tersebut, menurut Edward III, apabila implementasi ini berhasil baik secara efektif dan efisien, maka para implementator harus mampu mengetahui apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga dapat mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan. Kebijakan yang kompleks mengharuskan adanya kerjasama antar semua pihak termasuk birokrasi sendiri, karena birokrasi merupakan pelaksana sebuah kebijakan maka harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan. Disini Edward III berpendapat terdapat 2 karakteristik yang mampu mendongkrak kinerja birokrasi yaitu Standard Operating Procedures (SOPs) dan Fragmentasi.

Model Implementasi selanjutnya adalah menurut Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan secara linier berjalan dari kebijakan public. Pada pendapat ini implementasi dipengaruhi oleh beberapa variable atau faktor yaitu :

a. Standar dan tujuan

Implementasi kebijakan dapat dilihat kinerjanya dan dapat diukur keberhasilannya dengan sosio-kultur yang terdapat pada level pelaksana kebijakan. Apabila ukuran atau standar serta sasaran dan tujuan terlalu ideal atau sempurna di tingkat masyarakat, maka akan sulit untuk di lakukan di masyarakat.

b. Sumber Daya

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung dengan bagaimana pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada. Salah satunya adalah manusia yang menjadi sumber daya terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tahapan atau proses implementasi menuntut untuk tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas yang tepat dan sesuai dengan pekerjaannya yang disyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan

sebelumnya secara politik. Namun apabila kapasitas kemampuan SDM nihil maka akan sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik kelompok pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan informal akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat dikatakan penting karena kinerja suatu implementasi dapat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksana kebijakan. Maka pada variabel ini dibutuhkan agen pelaksana yang bersifat demokratis, disiplin dan persuasif.

d. Komunikasi

Mekanisme ampuh dalam implementasi kebijakan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terlibat. Maka dengan ini diperlukan komunikasi yang baik dalam koordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi, ataupun kesalahan kecil dalam tahap implementasi kebijakan.

e. Sikap/ disposisi pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana akan timbul serta akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya tahapan implementasi kebijakan. Kemungkinan hal ini akan terjadi dikarenakan dalam perencanaan kebijakan bukan disusun oleh masyarakat yang mengetahui secara pasti seperti apa permasalahannya.

f. Lingkungan Sosial politik dan ekonomi

Faktor lingkungan social politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan. Dalam pendapat Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa lingkungan social ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan menyebabkan kegagalan kinerja kebijakan. Van Meter dan Van Horn juga mengajukan hipotesis mengenai lingkungan social ekonomi politik dapat mempengaruhi karakter badan pelaksana, serta kecenderungan para pelaku pelaksana.

Model Implementasi Kebijakan selanjutnya adalah menurut Merilee S. Grindle (Agustino, 2014 dalam Afri Dwi Liana, 2019) yaitu implementasi kebijakan public dapat dikatakan berhasil dapat diukur melalui proses pencapaian akhir (Outcome) yang dilihat tercapai atau tidaknya sebuah tujuan akhir yang ingin dicapai, dimana pengukuran keberhasilan tersebut dilihat dari dua hal berikut ;

- a. Dilihat dari Prosesnya, yang mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan design yang merujuk pada aksi kebijakan
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai yang dapat diukur dengan melihat dua factor yaitu :
 - Dampak atau efek yang terjadi di masyarakat baik secara individu maupun kelompok
 - Tingkat Perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

1.5.7. Program Keluarga Berencana

Program merupakan suatu dasar perencanaan atau kerangka dasar sebuah kegiatan. Menurut KBBI Program merupakan rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan dilakukan. Terdapat beberapa aspek yang dibuat dalam program yaitu mengenai tujuan yang ingin dicapai, aturan dan prosedur yang harus dilakukan, adanya bentuk

kegiatan yang dilakukan, adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program serta adanya susunan rancangan strategi dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya suatu program maka adanya rencana atau rancangan yang lebih terarah.

Menurut Abdul Wahab dalam Arina (2018:30) mengatakan : “ Kebijakan Publik yang masih abstrak, kemudian diterjemahkan dalam bentuk program yang lebih operasional yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Penjabaran suatu program terdapat 5 hal yaitu ;

1. Berbagai macam sasaran yang konkrit
2. Jangka waktu yang diperlukan
3. Jumlah biaya yang dibutuhkan serta identifikasi sumber
4. Jenis kegiatan yang dilaksanakan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan

Rasa prihatin mengenai ledakan jumlah penduduk di dunia diutarakan oleh seorang pendeta di Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus pada tahun 1766. Beliau mengatakan bahwa jika tidak adanya pembatasan dalam berkembangbiakan secara cepat, maka dapat menyebabkan sebagian wilayah di bumi akan mengalami kepadatan. Laju pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat dikarenakan adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia yang tidak terkendali. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali ini akan mengakibatkan terjadinya kekurangan makanan. Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan kemiskinan di masyarakat.

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta mengurangi kemiskinan yang diakibatkan ledakan penduduk ini Malthus mengusulkan dua cara

pembatasan yaitu *Preventive Cheks* dan *Positive Cheks*, yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 1.7
Pembatasan Pertumbuhan Penduduk

<i>Preventive Cheks</i> (Melalui Penekanan Kelahiran)		<i>Positive Cheks</i> (Melalui Proses Kelahiran)	
Moral Restraint (Pengerangan diri)	Vice (Penguraangan Kelahiran)	Vice (Kejahatan)	Misery (Kemelaratan)
<ul style="list-style-type: none"> • Usaha dalam mengekang nafsu seksual • Penundaan Perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguguran • Homoseksual • Penggunaan Alat Kontrasepsi • Promiscuity • Adultery 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan kepada anak-anak • Pembunuhan orang cacat • Pembunuhan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi Epidemii atau bencana Alam • Terjadinya peperangan • Terjadinya kelaparan atau kekuarrangan makanan

Sumber : Ida Bagoes Mantra, 2013: 52

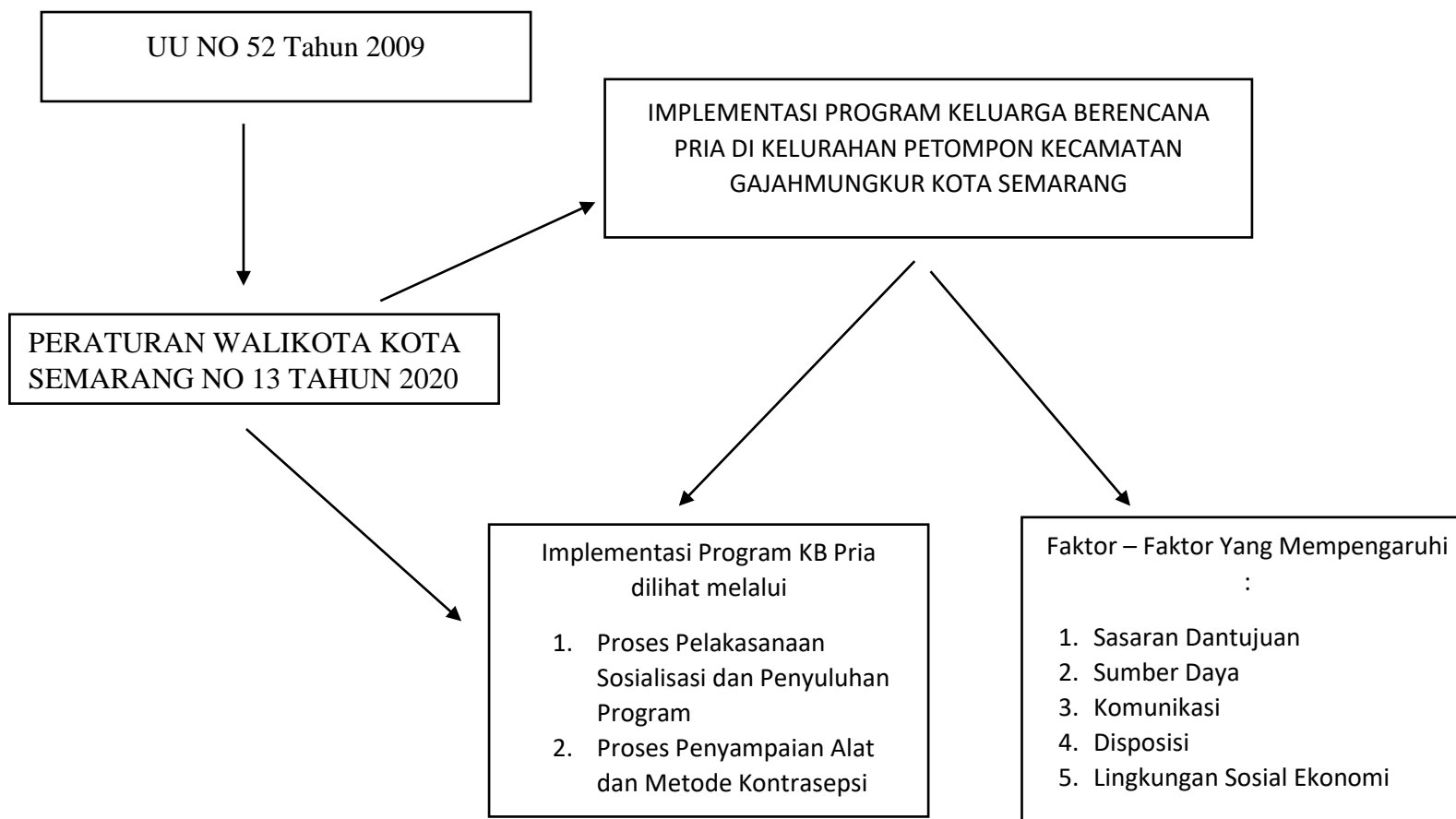
Menurut WHO KB memiliki definisi sebuah tindakan yang dapat membantu individu ataupun pasangan baik suami maupun istri agar menghindari terjadinya kehamilan beserta kelahiran yang tidak diinginkan, atau mendapatkan kehamilan sesuai antara kedua belah pihak, kemudian dapat mengatur jarak kehamilan serta dapat menentukan jumlah anak yang dikehendaki oleh pasangan/

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Program ini merupakan cara preventif yang dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan sesuai dengan teori Malthus. Program KB ini ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah pada

29 Juni 1970, serta pada saat itu juga dibentuk sebuah lembaga yang menaungi Program ini, yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun program ini mulai dilaksanakan pada tahun 1957 dan masih dibawah naungan sektor kesehatan, belum masuk dalam urusan sektor kependudukan.

Sasaran dalam program ini adalah pasangan usia subur, agar dapat membantu dalam mengendalikan angka fertilitas. Program KB ini dinaungi oleh UU No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Adanya program ini diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia serta dapat di laksanakan baik oleh wanita / Pria baik Istri/ Suami.

Gambar 1.2.
Gambar Alur Pikiran



1.6.Fenomena Penelitian dan Operasional Konsep

a. Fenomena Penelitian

Fenomena yang dilihat dan dibahas dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi Program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur yaitu

1. Mengenai bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Petompon
2. Faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam implementasi Program KB Pria.

b. Operasional Konsep

Pada penelitian ini penulis akan menguraikan apa saja yang akan dibahas dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan di lapangan sebagai objek dari penelitian ini. Fenomena yang diamati yaitu bagaimana keterlibatan suami dalam program Keluarga Berencana. Fenomena penelitian berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam kegiatan pemikiran dan penyesuaian teori-teori tentang Berikut Konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini :

A. Implementasi Program Keluarga Berencana

Konsep penelitian implementasi program Keluarga Berencana adalah Suatu proses rangkaian kegiatan Pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Berencana , meliputi proses pelaksanaan kebijakan, kemudian. Pada konsep ini fenomena Implementasi Program Keluarga Berencana Pria Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur dapat dilihat dari :

- Proses pelaksanaan kebijakan yang dilihat dari 2 faktor yaitu :
 - a. Penyampaian Program kepada masyarakat

b. Proses dalam konsultasi akseptor KB

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor Pendorong dan atau faktor penghambat yang akan diteliti pada implementasi kebijakan meliputi Sasaran dan Standar Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, Lingkungan Sosial: Faktor – faktor yang mendorong maupun menghambat dalam implementasi program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Petompon dapat dilihat melalui :

- Sasaran dan Standar Kebijakan

Indikator – indikator keberhasilan serta tujuan kebijakan perlu jelas dan terukur sehingga para pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan sehingga tujuan yang direncanakan tercapai. Hal ini dapat dilihat melalui :

- a. Adanya Regulasi yang jelas mengenai Program KB

- b. Tercapainya sasaran kebijakan yang dilihat dari keberhasilan implementasi yang dilihat dari aspek yang telah di sebutkan sebelumnya

- Sumber Daya

Merupakan modal yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk melakukan implementasi kebijakan sehingga tujuan dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan dalam memahami program KB Pria.

- Komunikasi

Merupakan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran yang dilihat melalui

- a. Seberapa jelasnya informasi yang disampaikan terkait Program KB Pria

- b. Koordinasi antara pemilik kepentingan dengan pemerintah (Dinas) terhadap pelaksanaan di lapangan
- Disposisi
Merupakan Kecenderungan Sikap terhadap kebijakan yaitu sikap para pelaksana program KB Pria di Kelurahan Petompon berkenaan dengan sikap penerimaan maupun penolakan, juga disertai dengan alasan para pelaksana.
- Lingkungan Ekonomi, social dan politik
Merupakan pengaruh dalam pelaksanaan implementasi yang dilihat masing masing individu dari kelompok sasaran.

1.7. Argumen Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Program Keluarga Berencana Pria yang dilakukan ini, peneliti berargumen bahwa rendahnya pihak Pria dalam pelaksanaan program KB dan penggunaan kontrasepsi ini dikarenakan masih adanya mitos akan keterlibatan Pria dalam KB maka akan mengganggu atau menurunkan tingkat seksual. Selain itu peneliti berargumen bahwa tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh badan pengurus KB di tingkat kelurahan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Bentuk Penelitian

Penelitian Implementasi Program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ini Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang menggunakan model kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek serta fenomena yang ada serta ingin diteliti. Hal ini termasuk bagaimana unsur yang terdapat dalam variabel penelitian itu saling berinteraksi satu sama lain dan

memiliki suatu produk interaksi yang sedang berlangsung (Siagian 2011:52). Pada penelitian deskriptif ini bersiat menjelaskan sesuatu serta menggambarkan keadaan dalam lapangan dan dikelaskan melalui kalimat. Dalam penelitian ini, penulis ingin menggambarkan atau menjelaskan secara keseluruhan mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Lokasi ini dipilih oleh penulis dikarenakan ketertarikan penulis meneliti bagaimana proses implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Petompon, selain itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwasannya kelurahan petompon merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah Kampung KB di Kota Semarang.

1.8.3. Subjek Peneliti (Informan)

Subjek peneliti atau informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi, fakta maupun data dari objek yang sedang diteliti. Subjek penelitian yang telah dipilih dalam penelitian ini akan menjadi informan yang diharapkan mampu memberikan informasi dan fakta serta data dalam penelitian. Maka Informan dalam penelitian ini adalah

1. Pegawai bagian Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Semarang
2. Koordinator KB Kecamatan Gajahmungkur
3. Petugas Lapangan (Kader) Penyuluhan KB di Kelurahan Petompon
4. Warga Kelurahan Petompon yang menjadi Peserta Aktif KB

1.8.4. Sumber Data Penelitian

1.8.4.1.Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer, yaitu data yang dapat ditemukan dari sumbernya secara langsung atau data mentah yang didapatkan melalui:

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu berupa pengamatan terhadap obyek serta fenomena yang menyangkut akan penelitian ini. Observasi ini akan dilakukan langsung oleh peneliti secara jelas dan terusterang. Sehingga objek yang diteliti mengetahui daro awal penelitian hingga akhir.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakuakndidalam penelitian ini adalah melakukan perkenalan, menjelaskan gambaran secara singkat atas maksud dan tujuan, dan menimbulkan rasa saling percaya agar dapat memperoleh data dan fakta yang dibutuhkan.

1.8.4.2.Data Sekunder

a. Kepustakaan

Pada studi kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi yang relevan denga topic penelitian serta berdasarkan text book ataupun jurnal dan artikel ilmiah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data yang bersumberkan dari dokumen sah atau resmi yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian model kualitatif adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setelah data yang telah didapatkan dari seluruh informan atau sumber yang lainnya telah terkumpul. Dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah memilah data-data, kemudian mengelompokkan sehingga data dapat diolah dan dikelola. Dalam

penelitian ini analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan mengolah informasi data, mempelajari data yang dari berbagai sumber yang kemudian disusun serta dikategorikan dan memeriksa keabsahan data, serta melakukan analisis dengan kemampuan yang dimiliki peneliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan rumus dalam mengolah data, karena hanya menjelaskan gambaran data yang telah terkumpul dari beberapa sumber.